

PENDIDIKAN ISLAM MASA AWAL KEMERDEKAAN

Syahril¹

*Abstrak: Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia, penyelesaian pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa: Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang tidak berurat akar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Kenyataan yang demikian timbul karena kesadaran umat Islam yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Sebab pada zaman penjajahan Belanda, pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini minimal ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yaitu **pertama**: Sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin. **Kedua** yaitu Politik non kooperatif para ulama terhadap Belanda yang menfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk pendidikan moderennya, adalah salah satu bentuk penyelewengan agama. Mereka berpegang kepada salah satu hadits Nabi Muhammad saw yang artinya: "Barangsiapa menyerupai suatu golongan, maka ia termasuk ke dalam golongan itu". Hadits tersebut melandasi sikap para ulama pada waktu itu.*

Kata-kata Kunci: Pendidikan, Islam, Awal Kemerdekaan

A. Pendahuluan

Sejarah biasanya ditulis dan dikaji dari sudut pandangan suatu fakta atau kejadian tentang peradaban bangsa. Maka obyek sejarah pendidikan Islam mencakup fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam baik informal, formal maupun non formal. Dengan demikian akan diperoleh apa yang disebut "Sejarah serba obyek". Dan hal ini sejalan dengan peranan agama Islam sebagai agama dakwah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, menuju kehidupan yang sejahtera lahir batin (material dan spiritual). Sebagai cabang ilmu pengetahuan, obyek sejarah pendidikan Islam umumnya tidak jauh berbeda dengan obyek-obyek sejarah pendidikan, seperti mengenai sifat-sifat yang dimilikinya. Dengan perkataan lain bersifat menjadi "sejarah serba subyek".

Dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, kaum Muslim memberikan kontribusi besar dan memainkan peran penting demi tercapainya kemerdekaan. Lebih khusus lagi, pesantren melalui tokoh-tokoh muslim banyak memberikan sumbangan-sumbangan perjuangan bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Juga ide-ide tentang pendidikan agama di sekolah.²

¹ Mahasiswa S2 Prodi PAI UIN Ar-Raniry Darussalam Dan Guru SMA Negeri 6 Banda Aceh

²A. Ridwan Saidi, *Pemuda Islam Dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 40.

Jurnal ini akan mengkaji tentang pendidikan agama Islam di Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa awal kemerdekaan bisa ditelusuri dengan Tujuan, Sumber daya manusia, Materi, Metode, Sarana Prasarana/ Institusi pada saat itu. Juga kita akan menelusuri bagaimana pesantren, madrasah dan pendidikan agama Islam di sekolah umum pada masa itu. 3

Melihat beberapa kenyataan di atas, maka dengan mempelajari sejarah pendidikan, khususnya pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan. Maka para pendidik serta pembina pendidikan diharapkan akan memperoleh bahan-bahan pemikiran dan tindakan kearah usaha-usaha memajukan pendidikan dalam korelasinya dengan aneka permasalahan yang telah diuraikan.

B. Pembahasan

1. Tujuan Pendidikan Islam dan SDM Indonesia pada awal Kemerdekaan

a. Tujuan Pendidikan Islam

Perkembangan pendidikan semenjak kita mencapai kemerdekaan memberikan gambaran yang penuh dengan kesulitan. Pada masa ini, usaha penting dari pemerintah Indonesia pada permulaan adalah tokoh pendidik yang telah berjasa dalam zaman kolonial menjadi menteri pengajaran. Dalam kongres pendidikan, Menteri Pengajaran dan Pendidikan yang pertama Ki Hajar Dewantara membentuk panitia perancang RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Hal ini bertujuan untuk membentuk sebuah sistem pendidikan yang berlandaskan pada ideologi bangsa Indonesia sendiri.⁴

Praktek pendidikan zaman Indonesia pada awal kemerdekaan sampai tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Praktek pendidikan zaman kolonial Belanda bertujuan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi secepat-cepatnya melalui pendidikan Barat.⁵ Praktek pendidikan kolonial ini tetap menunjukkan diskriminasi antara anak pejabat dengan anak kebanyakan. Kesempatan luas tetap saja diperoleh anak-anak dari lapisan atas. Dengan demikian, sesungguhnya tujuan pendidikan adalah demi kepentingan penjajah untuk dapat melangsungkan penjajahannya. Yakni, menciptakan tenaga kerja yang bisa menjalankan tugas-tugas penjajah dalam mengeksploitasi sumber dan kekayaan alam Indonesia. Di samping itu, dengan pendidikan model Barat akan diharapkan muncul kaum bumi putera yang berbudaya barat, sehingga tersisih dari kehidupan masyarakat kebanyakan. Pendidikan zaman Belanda membedakan antara pendidikan orang priyayi dengan orang pribumi. Demikian pula bahasa yang digunakan berbeda. Namun perlu dicatat, betapapun juga, pendidikan Barat (Belanda) memiliki peran yang penting dalam melahirkan pejuang-pejuang yang akhirnya berhasil melahirkan kemerdekaan Indonesia.

Pada zaman Jepang meski hanya dalam tempo yang singkat, tetapi bagi dunia pendidikan Indonesia memiliki arti yang amat signifikan. Sebab, lewat pendidikan

³Encyclopedia Americana, vol. IV, *Scholastic Library Pub; International edition*, January 1, 2005.

⁴BJ. Bolan, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 12.

⁵Enung K Rukiati, Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*,: (Bandung: CV Pustaka Setia 2006), hlm. 21.

Jepanglah sistem pendidikan disatukan. Tidak ada lagi pendidikan bagi orang asing dengan pengantar bahasa Belanda.⁶

Satu sistem pendidikan nasional tersebut diteruskan setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang. Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Tujuan pendidikan Nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara.

Tujuan Pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuk kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian lain Pendidikan Islam merupakan suatu bentuk kepribadian utama yakni kepribadian muslim. Kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikan adalah mewujudkan tujuan ajaran Allah.⁷

Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.⁸

Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Bisa dianalisis bahwa praktek pendidikan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan lainnya.⁹ Pada masa ini, lingkungan politik terasa mendominasi praktek pendidikan. Upaya membangkitkan patriotisme dan nasionalisme terasa berlebihan, sehingga menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri.

b. Keadaan Sumber Daya Manusia Pada awal Kemerdekaan

Sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat Indonesia. Pada waktu zaman kolonial Belanda adanya diskriminasi sebagai ciri pokoknya menempatkan bangsa Belanda sebagai warga negara kelas satu, kemudian timur asing dan yang terakhir adalah golongan pribumi Indonesia. Struktur itu berubah lagi setelah zaman pendudukan Jepang tingkatannya meliputi kelas 1 adalah orang Jepang, Pribumi Indonesia kelas 2, dan Timur Asing dan Indo menjadi warga negara kelas 3. Sehingga membuat Sumber daya manusia Indonesia menjadi lemah.

Setelah Indonesia merdeka diskriminasi yang pernah dilakukan oleh kolonial Belanda maupun Jepang dihapuskan. Indonesia tidak mengadakan perbedaan perlakuan berdasarkan ras, keturunan, agama, atau kepercayaan yang dianut warga negaranya. Semua

⁶Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia-Lintasan Sejarah dan Perkembangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69.

⁷Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 123.

⁸Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Ed. I, cet. V, (Jakarta: Bumi Aksara, Februari 1997), hlm. 162.

⁹Ismail, Badruzzaman dkk, *Delapan Puluh Tahun melalui Jalan Raya Dunia: A. Hasjmy Aset Sejarah masa Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 53.

warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Namun, di sana-sini masih terdapat sisa-sisa semangat diskriminasi dari zaman penjajahan yang harus dilenyapkan.

Akan tetapi Indonesia sangat beruntung dengan adanya beberapa tokoh Pendidikan Islam yang berjuang dengan pemikiran klasik pada awal kemerdekaan demi memperjuangkan hak-hak agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengenyam pendidikan yang berbasis Islam demi mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan handal serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain walaupun harus melalui proses yang amat panjang, melelahkan dan juga tantangan yang tiada henti. Adapun tokoh-tokoh yang memiliki Sumber daya manusia dan semangat yang luar biasa yang hingga kini sulit untuk dicari penggantinya seperti:

1) Kyai H Ahmad Dahlan (Yogyakarta, 1 Agustus 1869-23 Pebruari 1923)

Cita-cita Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang ulama adalah tegas, ialah hendak memperbaiki masyarakat Indonesia berlandaskan cita-cita agama Islam. Usaha-usahanya ditujukan hidup beragama.¹⁰ Keyakinan beliau ialah bahwa untuk membangun masyarakat bangsa haruslah terlebih dahulu dibangun semangat bangsa.

Muhammadiyah menekankan usahanya kepada perbaikan hidup beragama dengan amal-amal pendidikan dan sosial.

2) Hasyim Asy'ari (Jombang 14 Februari 1881 M - 25 Juli 1947 M)

Gagasan Hasyim Asy'ari adalah bahwa untuk berjuang mewujudkan cita-cita nasional termasuk dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah berupa organisasi pada tahun 1926 ia mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam terbesar pertama di Indonesia, dalam organisasi ini Hasyim Asy'ari berjuang membina dan menggerakkan masyarakat melalui pendidikan. Beliau juga mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng sebagai basis pendidikan dan perjuangan melawan Belanda.

3) KH Abdul Halim (Majalengka, 26 Juni 1887 M - 7 Mei 1962 M)

Dia adalah pelopor gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang kemudian berkembang menjadi peryerikatan Ulama, dimulai pada tahun 1911, yang kemudian berubah menjadi Persatuan Umat Islam (PUI) pada tanggal 5 April 1952 M

Pemikiran KH Abdul Halim berpengaruh dalam perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Islam tidak menghendaki seorang muslim semata-mata mengejar akhirat saja dengan mengabaikan dunia. Tetapi sebaliknya pula, ia tidak menyetujui apabila kehidupan duniawi saja yang dikejar, tanpa memperhatikan kehidupan rohani.

Pada umumnya KH. Abdul Halim berusaha menyebarkan pemikirannya bahwa setiap pertikaian, apapun juga sifatnya dapat diselesaikan atas dasar saling pengertian dan kompromi. Dikemukakan bahwa ia tidak pernah mengecam dan golongan tradisi ataupun orang lain atau organisasi lain yang tidak sepaham dengan dia. Tablighnya lebih banyak merupakan anjuran untuk menegakkan etika di dalam masyarakat dan bukan merupakan kritik tentang pemikiran ataupun pendapat orang lain.

4) Ki Hajar Dewantara (Yogyakarta, 2 Mei 1889 M - 28 April 1959 M)

¹⁰Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 77.

Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan juga Menteri Pendidikan & Kebudayaan Indonesia yang pertama. Beliau banyak mengkonsep sistem pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan. Visi, misi dan tujuan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan sebagai alat perjuangan untuk mengangkat harkat, martabat dan kemajuan umat manusia secara universal. Sehingga mereka mampu berdiri kokoh sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju dan tetap berpijak kepada identitas dirinya sebagai bangsa yang telah memiliki peradaban dan kebudayaan yang berbeda dengan bangsa lain.

Selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga menginginkan agar pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu pendidikan yang dapat membawa kemajuan bagi peserta didik. Ungkapan ini merupakan respon dari adanya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat kita, yaitu pendidikan yang mengajarkan hal-hal yang sulit dipelajari tetapi tidak berfungsi untuk masa depan.¹¹

Pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi.

Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pendidikan Islam lainnya yang juga ikut berperan mengembangkan dan memajukan pendidikan Islam lainnya.

5) Teungku M. Daud Beureueh (Beureueh, 15 September 1889 M - 28 April 1987 M)

Teungku M. Daud Beureueh (akrab disapa Abu) dilahirkan pada 15 September 1899 di sebuah kampung bernama "Beureueh", Kabupaten Pidie. Kampung Beureueh adalah sebuah kampung heroik Islam, sama seperti kampung Tiro. Ayahnya seorang ulama yang berpengaruh di kampungnya dan mendapat gelar dari masyarakat setempat dengan sebutan "Imeuem (imam) Beureueh". Teungku Daud Beureueh tumbuh dan besar di lingkungan religius yang sangat ketat. Ia tumbuh dalam suatu *formative age* yang sarat dengan nilai-nilai Islam, ia juga memasuki masa dewasa di bawah bayang-bayang keulamaan ayahnya yang sangat kuat mengilhami langkah hidupnya kemudian.¹²

Orang tuanya memberi nama Muhammad Daud (dua nama Nabiyullah yang diberikan kitab al-Quran dan Zabur). Dari penamaan ini sudah terlihat, sesungguhnya yang diinginkan orang tuanya adalah bila besar nanti ia mampu mengganti posisi dirinya sebagai ulama sekaligus mujahid yang siap membela Islam. Karena itu, pada masa-masa usia sekolah, ayahnya tidak memasukkan beliau ke lembaga pendidikan resmi yang dibuat Belanda seperti: *Volkschool*, *Government Indlandsche School*, atau HIS. Namun lebih mempercayakan kepada lembaga pendidikan yang telah lama dibangun ketika masa kerajaan Islam dahulu semodel dayah/zawiyah. Yang menjiwai ayahnya adalah semangat anti-Belanda/penjajah yang masih sangat kuat. Apalagi ketika itu Aceh masih dalam suasana perang di mana gema Hikayat Perang Sabil masih nyaring di telinga masyarakat Aceh.

¹¹Muhammad Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya, 1985), hlm. 48.

¹²Muhammad Ali Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hlm. 101.

Dalam pusat pendidikan semacam ini, Daud ditempa dan dididik dalam mempelajari tulis-baca huruf Arab, pengetahuan agama Islam (seperti fikih, hadis, tafsir, tasawuf, mantik, dan sebagainya), pengetahuan tentang sejarah Islam, termasuk sejarah tata negara dalam dunia Islam di masa lalu, serta ilmu-ilmu lainnya. Dari latar belakang pendidikan yang diperolehnya ini, tidak disangsikan lagi, merupakan modal bagi keulamaannya kelak.

Sekalipun tidak mendapatkan pendidikan Belanda, namun dengan kecerdasan dan kecepatannya berpikir, beliau mampu menyerap segala ilmu yang diberikan kepadanya itu, termasuk bahasa Belanda. Kebiasaannya mengkonsumsi ikan, yang merupakan kebiasaan masyarakat Aceh, telah membuatnya menjadi *quick-learner* (mampu belajar cepat).

Kemampuan yang luar biasa ini, sebagian besar karena ia merasa menuntut ilmu adalah wajib. Maka belajar tentang segala sesuatu, dipersepsikannya hampir sama dengan “mendirikan shalat”. Dalam usia yang sangat muda, 15 tahun, ia sudah menguasai ilmu-ilmu Islam secara mendalam dan mempraktekkannya secara konsisten. Dengan segera pula ia menjadi orator ulung, sebagai “singa podium.” Ia mencapai popularitas yang cukup luas sebagai salah seorang ulama di Aceh. Karena itu, beliau mendapat gelar “Teungku di Beureueh” yang kemudian orang tidak sering lagi menyebut nama asli beliau, tetapi nama kampungnya saja. Ketenaran seorang tokoh di Aceh senantiasa melekat pada kharisma kampungnya. Kampung adalah sebuah entitas politik yang pengaruhnya ditandai dengan tokoh-tokoh perlawanan. Dari kenyataan ini, seorang yang terlahir dari sebuah entitas resisten, tidak akan pernah berhenti melawan sebelum cita-cita tercapai. Kendatipun pihak lawan menggunakan segala daya dan upaya untuk membungkam perlawanan tersebut.

Pada zamannya, Abu Beureueh dikenal sebagai ulama yang tegas dan keras pendiriannya. Ia tidak segan-segan menjatuhkan vonis haram atau kafir bagi setiap orang yang telah melanggar aturan agama. Menurut M. Nur El Ibrahimy mengatakan bahwa Daud Beureueh tidak pernah masuk sekolah, tapi ia tidak buta huruf (latin/arab). Dia bukan keluaran pesantren seperti HAMKA yang terkenal, tetapi ia malah mendirikan Dayah yaitu Madrasah Sa’adah Abadiyah di Blang Paseh Sigli pada tahun 1931 dan tersohor keseluruh seantero Aceh. Sembilan tahun kemudian ia bersama kawan-kawannya mendirikan PUSA yang menjadi motor bagi kaum ulama dalam memajukan pendidikan Aceh dan mengusir penjajah Belanda-Jepang di tanah Aceh. Dalam musyawarah pembentukan PUSA di Matang Glumpang Dua, Tgk. Daud Beureueh terpilih ketua PUSA. Aceh adalah negeri sejuta ulama, dan mengetuai organisasi politik ulama berarti juga secara de facto menjadi “Bapak Orang-Orang Aceh”.¹³

Ia pernah menjadi Gubernur militer untuk Wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo (1947-1948), sedang masa tersebut rakyat Aceh berhasil melumpuhkan invansi belanda di Medan Area ketika semua wilayah lain di Indonesia telah dikuasai Belanda.

6) Prof. H. Muhammad Ali Hasjmy (Lampaseh Kabupaten Aceh Besar, 28 Maret 1914 M - 18 Januari 1998 M)

Sejak muda A. Hasjmy telah aktif bergerak dalam berbagai Pergerakan di antaranya tahun 1932 menjadi anggota Perhimpunan Pemuda Islam Indonesia (HPII) dan tahun 1933-1935 menjadi Sekretaris HPII Cabang Padang Panjang. Pada tahun 1935 bersama-sama

¹³ Muhammad Ali Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia...*, hlm. 89.

beberapa pemuda yang baru kembali dari Padang Panjang mendirikan SEPIA (Serikat Pemuda Islam Aceh). Sejak tahun 1939 menjadi Anggota Pengurus Pemuda PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh).

Pemikiran Pendidikan

Pada masa awal kemerdekaan, tingkat pendidikan di Aceh masih sangat rendah. Hal itu memang telah disengaja oleh Belanda agar mereka lebih dapat berkuasa dan menjajah Aceh dalam waktu yang cukup lama. Ketika A. Hasjmy menjadi Gubernur Aceh banyak hal yang berhasil dilakukannya, termasuk dalam bidang pendidikan.

Kecintaan A. Hasjmy terhadap dunia pendidikan tidak dapat disangsikan lagi. Ia sangat mementingkan pendidikan dalam hidupnya. Bahkan, ia sering menasehati generasi muda agar memperhatikan pendidikan sebagai modal penting dalam hidup ini. Kecintaannya terhadap pendidikan tersebut dilukiskan dalam syairnya berikut ini:

Ketika menjabat sebagai gubernur, A. Hasjmy berpikir bahwa tugas atau program pokok pemerintahannya adalah meningkatkan pendidikan rakyat. Sebagai implementasi dari program ini, maka muncul apa yang disebut sebagai gerakan “Konsepsi Pendidikan Darussalam”. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk melahirkan manusia Pancasila yang berjiwa benar, berpengetahuan luas, dan berbudi luhur.¹⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada tahap awal direncanakan pembangunan pusat-pusat pendidikan pada: (a). Tiap-tiap ibukota kecamatan yang dinamakan Taman Pelajar, yang mencakup di dalamnya: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, guru, asrama pelajar, dan sebagainya; (b). Tiap-tiap ibukota kabupaten yang dinamakan Perkampungan Pelajar, mencakup di dalamnya: Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, rumah guru, asrama pelajar, dan sebagainya; (c). Di ibukota Daerah Istimewa Aceh yang dinamakan Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam, mencakup di dalamnya: sekolah lanjutan atas dan berbagai lembaga pendidikan tinggi.

Dalam waktu yang relatif singkat, program pembangunan Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam atau yang lebih dikenal Kopelma Darussalam benar-benar terwujud. Di Aceh, berdiri dua Universitas besar kenamaan, yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Universitas yang pertama dikenal sebagai pusat pendidikan tinggi yang bersifat umum, sedangkan Universitas yang kedua dikenal sebagai pusatnya kajian keagamaan, khususnya Agama Islam.

Program pembangunan pendidikan tersebut masih dilanjutkan dan dikembangkan oleh generasi pasca- A. Hasjmy, bahkan hingga kini. Pembangunan sumberdaya manusia di Aceh telah mendapatkan dasar-dasar pemikirannya melalui para tokoh pembaharu pendidikan pada masa lalu, terutama melalui pembentukan sejumlah universitas di sana. Dengan demikian, hasil pembangunan yang sekarang diraih merupakan buah dari pohon yang telah ditanam dalam kepemimpinan masa lalu. Dalam hal ini, A. Hasjmy ikut berkontribusi penting karena telah membuat Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun yang pertama atau disebut dengan sebutan “Aceh Membangun”, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 19/1962 tanggal 17 Januari 1962.

Landasan dari konsep “Aceh Membangun” adalah cita-cita dan kepribadian rakyat Aceh sebagaimana dinyatakan di dalam Piagam Pancacita. Penyusunan konsep ini

¹⁴Muhammad Ali Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia...*, hlm. 147.

dilakukan oleh sebuah komisi yang dibentuk secara resmi melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Aceh. Untuk mengimplementasikannya, maka pada setiap tahunnya konsep ini dijabarkan secara rinci sehingga menjadi jelas dalam proses pelaksanaannya.

A. Hasjmy pernah mengeluarkan Keputusan No. 90 Tahun 1960 yang menetapkan tanggal 2 September sebagai Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh. Hal itu dilakukan untuk memajukan pendidikan di Aceh. Dalam rangka Hari Pendidikan Daerah itu dibuatkan piala bergilir yang diperebutkan setiap tahunnya. Ketika itu juga diciptakan dua lagu mars, yaitu "Mars Hari Pendidikan" dan "Mars Darussalam". Kedua lagu wajib itu harus dinyanyikan para murid sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Daerah Istimewa Aceh.

Pasca-kepemimpinan A. Hasjmy, pembangunan pendidikan di Aceh masih terus berjalan dengan sistem yang terintegrasi secara baik. Generasi muda setelahnya dengan mudah meneruskan kegiatan-kegiatan pendidikan karena generasi sebelumnya telah memberikan panduan yang komprehensif tentang konsep pembangunan pendidikan.

Pada tanggal 13 Mei 1967, Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Aceh ketika itu melalui suratnya No. 27/1967 menetapkan bahwa tugas pengawasan dan pembangunan Kopelma Darussalam diserahkan kepada Yayasan Pembangunan Darussalam (YPD). Ketika itu, A. Hasjmy menjabat sebagai Ketua YPD. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan Kopelma Darussalam yang telah dirintis sejak tahun 1958 masih berjalan.

2. Materi dan Metode Pendidikan Islam

Salah satu tugas penting yang dilakukan oleh Departemen Agama pada saat itu adalah, menyelenggarakan serta mengawasi pendidikan agama. Lembaga lembaga pendidikan Islam sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman penjajahan Belanda.¹⁵ Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang tersebar di berbagai pelosok yang dipimpin oleh seorang ulama atau kyai lembaga ini tidak memiliki Materi yang memadai juga Metode serta Kurikulum yang jelas terhadap kemajuan seorang penuntut sangat ditentukan oleh kerajinan, kesungguhan dan ketekunan masing-masing. Dengan berkembangnya zaman di awal abad ke-20 persoalan administrasi dan organisasi pendidikan mulai mendapat perhatian dari beberapa kalangan atau organisasi. baik ilmu Agama seperti Tauhid, Tafsir, Aqidah Akhlak, Tarikh, Hadits, Fiqih, ilmu Nahwu dan Sharaf, Muhadharah maupun ilmu umum/sekuler seperti ilmu bumi, ilmu hayat, falak/hisab, Ilmu menghitung dan sebagainya.

Adapun metode-metode belajar seperti memahami dan bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi juga ditekankan pengertian ditumbuhkan. Itulah yang dinamakan dengan madrasah. Madrasah ini di bagi menjadi dua jenjang yaitu Madrasah Ibtidaiyah selama 5-7 tahun. Dan tingkat lanjutan yang di namakan Madrasah Tsanawiyah selama 3-5 tahun. Akan tetapi semua yang sudah dirintis itu, mengalami kebuntuan karena terjadinya aksi militer Belanda yang ke-dua. Setelah revolusi selesai, usaha untuk mengkoordinasi sekolah-sekolah agama dimulai kembali, bukan saja untuk Jawa dan Sumatera melainkan seluruh Indonesia, seperti Madrasah Ibtidaiyah selama 6 tahun, Madrasah Tsanawiyah

¹⁵Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Dirasah Islamiyyah II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 76.

selama 4 tahun, Madrasah Aliyah selama 3 tahun, sekolah guru agama Islam selama 5 tahun.

Pendidikan Agama diatur secara khusus dalam UU No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu :

1. Di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
2. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum.¹⁶

Sedangkan kurikulum madrasah terdiri dari sepertiga pelajaran Agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti itu bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup hanya mengajarkan Agama saja, tetapi juga harus mengajarkan pendidikan umum, kebijakan seperti itu untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.

3. Sarana Prasarana Dan Institusi

Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 3 Januari 1946 Departemen Agama resmi berdiri dan bertugas mengurus, mengadakan sarana prasarana serta penyelenggaraan Institusi pendidikan Agama di sekolah umum dan madrasah serta pesantren-pesantren.

Pendidikan Islam setahap demi setahap diajukan. Istilah pesantren yang dulu hanya mengajar agama di *surau* dan menolak modernitas pada zaman kolonial Belanda, sudah mulai ikut mendirikan Madrasah dan Sekolah umum, sehingga pemuda Islam diberi banyak pilihan. Upaya ini merupakan usaha untuk menata diri di tengah-tengah realitas sosial modern dan kompleks. Pesantren juga telah lebih berkembang dengan berdirinya perguruan tinggi Islam.

Di samping itu Departemen Agama juga secara instansional disertai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama Institusi-institusi tersebut. Institusi pendidikan agama Islam ada yang berstatus negeri dan ada yang berstatus swasta.

Yang berstatus negeri misalnya:

- a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Tingkat Dasar);
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (Tingkat Menengah Pertama);

¹⁶Direktorat Jenderal Pendidikan Islam departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan tentang Pendidikan*, Jakarta: DEPAG, 2007.

- c. Madrasah Aliyah Negeri (Tingkat Menengah Atas). Dahulunya berupa Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN);
- d. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian berubah menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri). Kemudian di tahun-tahun berikutnya berubah lagi menjadi UIN (Universitas Islam Negeri)¹⁷

Pendidikan Agama Islam mulai diajarkan secara resmi di sekolah-umum negeri pada tahun 1946, dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) melalui menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan ialah penyediaan tenaga guru agama yang ditugaskan di sekolah-sekolah umum negeri. Untuk memenuhi kebutuhan guru agama Islam tersebut maka tahun 1950 Departemen Agama mendirikan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Lulusan ini dipersiapkan untuk menjadi guru agama Islam di Sekolah Dasar. Sedangkan untuk guru Agama Islam di sekolah menengah, maka didirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam.

Untuk memenuhi tenaga guru di SGHA dan tenaga dosen agama Islam di perguruan tinggi umum, maka Departemen Agama mendirikan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) yang kemudian bernama IAIN (Institut Agama Islam Negeri).

Sebagai contoh di Sumatera, Mahmud Yunus sebagai pemeriksa Agama pada kantor pengajaran mengusulkan kepada kepala pengajaran agar pendidikan Agama di sekolah-sekolah pemerintah ditetapkan dengan resmi dan guru-gurunya digaji seperti guru umum dan usul tersebut diterima.¹⁸

Sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang 1945. Ekstensi pendidikan agama Islam sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-undang pokok pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, bahwa belajar disekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

1) Perkembangan dan Pembinaan Madrasah

Perkembangan madrasah tak lepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga yang secara politis telah mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dari kalangan pengambil kebijakan. Walau tak lepas dari usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh agama seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy`ari dan Mahmud Yunus. Dengan perkembangan politis dan zaman, Departemen Agama secara bertahap terus menerus mengembangkan program-program peningkatan dan perluasan akses serta peningkatan mutu Madrasah.

Pada tahun 1951, terjadi perubahan nama terhadap kedua madrasah keguruan tersebut sesuai dengan Ketetapan Menteri Agama 15 Pebruari 1951. SGAJ menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHAI menjadi SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama). Pada tahun 1951 ini, PGA Negeri didirikan di Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan. Jumlah PGA pada tahun ini sebanyak 25

¹⁷Wathani Kharisul, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2011), hlm. 50-51.

¹⁸Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), hlm. 42.

unit dan tiga tahun kemudian, 1954, berjumlah 30 unit. sedangkan SGHA pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi dan Bandung.

Selanjutnya seiring dengan perubahan "Bagian Pendidikan" yang berkembang menjadi "Jawatan Pendidikan Agama" di Departemen Agama. Ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA diubah. PGA yang 5 tahun diubah menjadi 6 tahun, terdiri dari PGA Pertama 4 tahun dan PGA Atas 2 tahun. PGA jangka pendek dan SGHA dihapuskan. Sebagai pengganti SGHAI bagian "d" didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) dengan waktu belajar 3 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan PGA pertama.

2) Perkembangan Perguruan Tinggi Islam

Perguruan Tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) dibawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi di pemerintahan (Kementerian Agama) dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN.¹⁹

3) Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan Agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20, (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta).

Sebelumnya ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari Tahun 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa :

- a) Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dapat di mulai dari kelas 1 dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
- b) Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
- c) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.
- d) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 berbunyi :

- 1) Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran Agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
- 2) Cara menyelenggarakan pengajaran Agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan Menteri Agama.

¹⁹H.A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Demag, 1984), hlm. 88.

Penjelasan pasal ini antara lain menetapkan bahwa pengajaran Agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas para murid.

Pada tahun 1958 pemerintah terdorong untuk mendirikan Madrasah Negeri dengan ketentuan kurikulum 30 % pelajaran agama dan 70 % pelajaran umum.

Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan sebagai berikut :

- a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) setingkat SD lama belajar enam tahun.
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) setingkat SMP lama belajar tiga tahun.
- c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA lama belajar tiga tahun.

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualisme, yaitu 1) sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tidak mengenal ajaran Agama, yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda. 2) Sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat sendiri, baik yang bercorak isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya sebagaimana uraian tersebut di atas.²⁰

Kedua sistem pendidikan tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan atas saja. Sedangkan yang kedua (sistem pendidikan dan pengajaran Islam) tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat dan berurat berakar dalam masyarakat. Hal ini diakui oleh badan komite nasional Indonesia pusat (BP-KNIP) dalam usul rekomendasinya yang disampaikan kepada pemerintah, tentang pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru, pada tanggal 29 Desember 1945.²¹

Merdekanya bangsa Indonesia diharapkan bisa menggali segala potensi yang ada, sehingga dapat digunakan dan dikembangkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Harapan ini walaupun sudah lama dicanangkan, namun belum juga terwujud sampai sekarang.

C. Kesimpulan

Tujuan pendidikan Nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap dan bertanggung jawab dan siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Tujuan Pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani dan rohani menuju terbentuk kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian lain Pendidikan Islam merupakan suatu bentuk kepribadian utama yakni kepribadian muslim. kepribadian yang memiliki nilai-nilai Agama Islam memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikan adalah mewujudkan tujuan ajaran Allah.

²⁰Sugarda Purbakawaca, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm. 111.

²¹ B.J. Bolan, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 34.

Sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat Indonesia. Pada waktu zaman kolonial Belanda adanya diskriminasi sebagai ciri pokoknya menempatkan bangsa Belanda sebagai warga negara kelas satu, kemudian timur asing dan yang terakhir adalah golongan pribumi Indonesia. Struktur itu berubah lagi setelah zaman pendudukan Jepang tingkatannya meliputi kelas 1 adalah orang Jepang, Pribumi Indonesia kelas 2, dan Timur Asing dan Indo menjadi warga negara kelas 3 Sehingga membuat Sumber daya manusia Indonesia menjadi lemah. adanya beberapa tokoh Pendidikan Islam yang berjuang dengan pemikiran klasik pada awal kemerdekaan demi memperjuangkan hak-hak agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengenyam pendidikan yang berbasis Islam demi mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan handal serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain.

Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang tersebar di berbagai pelosok yang dipimpin oleh seorang ulama atau kyai lembaga ini tidak memiliki Materi yang memadai juga Metode serta Kurikulum yang jelas terhadap kemajuan seorang penuntut sangat di tentukan oleh kerajinan, kesungguhan dan ketekunan masing-masing. Dengan berkembangnya zaman di awal abad ke-20 persoalan administrasi dan organisasi pendidikan mulai mendapat perhatian dari beberapa kalangan atau organisasi.

Tanggal 13 Desember 1946 yang Departemen Agama bertugas mengurus, mengadakan sarana prasarana serta penyelenggaraan Institusi pendidikan agama di sekolah umum dan madrasah serta pesantren-pesantren.

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualisme, yaitu 1) sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah belanda. 2) Sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat sendiri, baik yang bercorak isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Ridwan Saidi, *Pemuda Islam Dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Dirasah Islamiyyah II, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- BJ. Bolan, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- BJ. Bolan, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan tentang Pendidikan*, Jakarta: DEPAG, 2007.
- Encyclopedia Americana, vol. IV, *Scholastic Library Pub; International edition*, January 1, 2005.
- Enung K Rukiati, Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia 2006.
- H.A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Demag, 1984.

- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia-Lintasan Sejarah dan Perkembangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Ismail, Badruzzaman dkk, *Delapan Puluh Tahun melalui Jalan Raya Dunia: A. Hasjmy Aset Sejarah masa Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Muhammad Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Hidakarya, 1985.
- Muhammad Ali Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugarda Purbakawaca, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung, 1970.
- Wathani Kharisul, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2011.